

**SKRIPSI**

**KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DESA**

*(Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah  
Istimewa Yogyakarta)*



**Disusun oleh:**

**Primus Yunior A. Nedji Soo**

**NIM: 16520095**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2022**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan tim penguji, untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ APMD” Yogyakarta Pada:

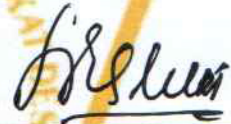
Hari : Senin  
Tanggal : 31 januari 2022  
Jurusan : 09.00 WIB  
Judul : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

NAMA

TIM PENGUJI

TANDA TANGAN

Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D  
Penguji/ Pembimbing



Ir. Nelly Tiurmida, MPA  
Penguji samping I




Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si.  
Penguji samping II



Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



  
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Primus Yunior A. Nedji Soo

NIM :16520095

Jurusan: Ilmu Pemerintahan

Judul : Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur  
Desa (Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten  
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Dengan ini saya menyatakan skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, Senin 17 Januari 2022

Yang menyatakan,



Primus Yunior A. Nedji Soo  
NIM 16520095

## MOTTO HIDUP

*“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan mu kepada ALLAH dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur,”*

*(Filipi 4:6)*

*“Pendidikan Merupakan Senjata Paling Ampuh yang Bisa Kamu Gunakan Untuk Merubah Dunia”.*

*(Nelson Mandela)*

*“ Kurangi mengeluh, lebihilah untuk bertindak. Mengeluh tidak akan memperbaiki apa pun, yang ada hanya membuat sakit hati. Menjamin sukses, tapi dijamin tidak ada perbaikan tanpa tindakan.*

*(Penulis)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penuh hikmat dan rasa syukur yang tak terhingga penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1), program studi Ilmu Pemerintahan tepat pada waktunya di kampus tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia saya juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara materi maupun moral selama saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Oleh karena itu karya tulis ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat luar biasa dalam hidup saya; Bapak Hilarius Soo dan Mama Josefina balo. Yang telah melahirkan dan membesarkan saya serta bersusah payah dalam mendidik saya dari kecil hingga detik ini. Saya sangat bangga dan bersyukur kepada Tuhan telah diberikan orang tua yang sangat luar biasa. Terimakasih banyak atas segala doa dan dukungan yang tiada hentinya disetiap langkah ku.
2. Kepada Bapak kecil saya ; Bapak Maksimus Mepa yang selalu mendukung dan menguatkan saya dalam menempuh pendidikan di kota Yogyakarta ini.
3. Kepada Kakak saya; kakak Yola ketiga adik saya; Sancha, Rama dan Gilbert yang selalu memberi dukungan kepada saya sampai pada detik ini saya merasa bersyukur memiliki kalian berempat.

4. Kepada dosen yang selalu mendukung dan memberi arahan kepada saya; Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph. D Terima banyak telah membimbing saya selama skripsian.
5. Kepada seseorang yang istimewa kawan-kawan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Yogyakarta terima banyak yang selalu setia mendukung.
6. Kepada keluarga besar Pak Yoto Wagyo yang sudah seperti keluarga sendiri di tanah rantau ini. Terimakasih banyak atas segala dukungan hingga detik ini.
7. Kepada teman-teman kelompok saat KKN; Giovani, Farinda Dita, Nelson, Fony, Sultan, Tania. Terimakasih banyak atas segala kerja sama dan dukungan.
8. Kepada seluruh sahabat-sahabat saya semasa kuliah ditanah rantau; Gregor, Ardy, Apry, Ferdin, Stefen, Rion dan kawan-kawan kos saya Abang Ken, Aldo, Pablo, Filly, Bolsen. Terimakasih telah mendukung dan menjadi teman curah selama skripsian. Kalian sahabat dan saudara terbaik saya, semoga kita tetap menjadi sahabat yang disayangi Tuhan.
9. Kepada teman-teman alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Aesesa, terimakasih atas segala dukungan hingga detik ini.
10. Kepada seluruh keluarga besar Nagekeo Yogyakarta, Terimakasih atas doa dan dukungannya.

## KATA PENGATAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (TYME) atas segala anugerah dan rahmat kebijaksanaan yang diberikan skripsi dengan judul **KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA** (*Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*) Adapun penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir belajar mahasiswa guna meraih gelar sarjana strata satu (SI) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Sebagai manusia layaknya umat Allah yang lainnya tentu saja banyak kekurangan dan kelemahan yang dimiliki oleh penulis selama melakukan proses penelitian di Kalurahan Sambirejo. Oleh karena itu penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini sehingga kritikan serta saran yang membangun dari semua pihak yang membacanya sangat diharapkan demi penyempurnaan dikemudian hari.

Pada kesempatan yang istimewa ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, Selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta
1. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, STPMD “APMD” Yogyakarta
2. Ibu Rr.Leslie Retno Angeningsih, Ph. D Selaku sebagai dosen pembimbing skripsi saya.

3. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, STPMD“APMD”  
Yogyakarta
4. Seluruh sahabat-sahabat mahasiswa/i STPMD“APMD” Yogyakarta
5. Bapak Wahyu Nugroho selaku Lurah Sambirejo
6. Bapak Mujimin selaku Sekretaris desa Sambirejo

Penulis sepenuhnya sadar dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan menjadi bahan pembelajaran bagi penulis untuk lebih giat dan teliti dalam proses penulisan penelitian ini. Saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kelancaran dan kesempurnaan dari penulisan penelitian ini. Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan penelitian ini. Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, Senin 17 Januari 2022

penulis

Primus Yunior A. Nedji Soo



## ABSTRAK

Koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak sederajat untuk saling memberi informasi dan megatur bersama (menyepakati) hal tertentu sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lain. Sementara sisi lain yang langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain. Pengertian koordinasi dilihat dari etimologi, dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah kegiatan yang memberikan informasi antara pihak sederajat agar proses pelaksanaan kegiatan tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Namun di Kalurahan Sambirejo akses, voice dan control masyarakat dikendalikan pemerintah desa. Control terhadap pemerintah yang dilakukan masyarakat masih sangat rendah dan berdampak pada kesewenangan pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya, sebagai dasar pemikiran penelitian bahwa telah terjadi dominasi kuat orang kuat lokal dalam pembangunan desa yang bekerja sama dengan pemerintahan desa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menjabarkan lebih lanjut mengenai koordinasi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman.

Dari hal tersebut penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, jumlah informan yaitu 12 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan yang bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi yang di lakukan oleh pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa belum terlaksana secara maksimal. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dapat di tinjau dari Koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur desa meliputi, 1) Koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan Desa, 2) Koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, 3) Koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pendukung wisata desa, 4) Koordinasi pemerintah desa dalam pelestarian lingkungan hidup, 5) Koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi dan kesehatan.

**Kata Kunci: Koordinasi, Pembangunan, Infrastruktur.**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu kota provinsi, kota madya, dan kabupaten, sekitar 514 kota sedangkan jumlah desa pada tahun 2021 adalah 81.616 Desa.

Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi *local state government* tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara *self governing community* dan *local self government*.

Kewenangan Desa tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dalam Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat.

Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan pembangunan untuk tetap mengarahkan aktivitasnya kearah pencapaian tujuan pembangunan tersebut dan mengurangi ketidakefisienan serta konflik yang merusak. Pengkoordinasian dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab

pelaksanaan pembangunan untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan. Tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan hendaknya mendapat perhatian yang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Oleh karena itu kesempurnaan sistem koordinasi diharapkan mampu menjadikan tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan menjadi tinggi. Unsur yang menunjang efektivitas pelaksanaan pembangunan dari sudut pencapaian tujuan bukan hanya mempertimbangkan sasaran, tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan manajemen sasaran.

Koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat bertumpuh pada peran desa dalam melibatkan masyarakat desa terlibat aktif dalam menjalankan pemerintahan, guna mencapai kesejahteraan dan kemajuan bersama. Objek penelitian peneliti Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman provinsi daerah istimewa yogyakarta. Penelitian ini mengkaji bagaimana koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan pemerintahannya, yang berlandaskan pemerintahan yang adil, jujur, dan transparan. Hasil pra penelitian penulis/peneliti bahwa Desa Sambirejo adalah desa yang eksklusif contohnya akses, *voice* dan *control* masyarakat dikendalikan pemerintah desa. Berikut 3 (tiga) penjelesan dalam pembangunan desa, pertama, akses masyarakat dalam pembangunan desa dikendalikan oleh orang kuat lokal ( kepala desa dan tokoh masyarakat), kedua *voice* menyampaikan aspirasi masyarakat dalam tahap musyawarah dusun hingga pada musyawarah desa diwakili oleh oknum tertentu hingga tidak melibatkan masyarakat Desa Sambirejo, *control* terhadap pemerintah yang dilakukan masyarakat masih sangat

rendah dan berdampak pada kesewenangan pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya, sebagai dasar pemikiran penelitian bahwa telah terjadi dominasi kuat orang kuat lokal dalam pembangunan desa yang bekerja sama dengan pemerintahan desa.

Fungsi koordinasi memegang peranan penting dalam menyukseskan pembangunan desa dalam bidang intrastruktur sebagai urat nadi perekonomian masyarakat, koordinasi adalah suatu usaha sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang ditentukan.

Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung, bahwa capaian kinerja pembangunan di Kalurahan Sambirejo masih belum maksimal, salah satunya terlihat dari kondisi umum infrastruktur yang ada masih kurang memadai khususnya pada infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di beberapa bagian. pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan desa namun pelaksanaannya belum maksimal dan terkesan lambat. Peran pemerintah desa sampai saat ini di rasakan masih kurang, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang di anggap masih kurang adanya kerjasama antar aparat pemerintah terlebih antara aparat dengan masyarakat. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang masalah *“Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa”*

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “ Bagaimanakah Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **C. 1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah

- a) Untuk Mendeskripsikan koordinasi pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa.
- b) Untuk Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur jalan di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

### **C. 2 Manfaat Penelitian**

Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penulisan ini adalah :

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan kepada pihak pemerintah Desa, dalam rangka usaha memaksimalkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi calon peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama.

## **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **D.1. Koordinasi**

Beberapa pengertian tentang koordinasi, telah banyak muncul baik dilihat dari segi etimologi maupun berdasarkan pendapat para ahli pengertian dari segi etimologi.

Kata *coordination* berasal dari kata *co-* dan *ordinare* yang sebagai *to regulate*. Dilihat dari etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lain. Sementara sisi lain yang langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain. (ndara,2001: 290). Pengertian koordinasi dilihat dari etimologi, dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah kegiatan yang memberikan informasi antara pihak sederajat agar proses pelaksanaan kegiatan tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Beberapa pendapat para ahli mengenai koordinasi:

Pengertian menurut Henry Fayol, mengkoordinasi berarti bersama menyatukan, menyelaraskan semua kegiatan dan usaha.(sunarto,1984: 124), Henry Fayol mengartikan koordinasi sebagai proses penyatuan yang mengikat semua pihak yang terlibat bersama untuk melaraskan semua kegiatan baru direncanakan dan sedang dilaksanakan bersama.

Pengertian koordinasi menurut husbian lebih melihat koordinasi yang dilakukan manajer dalam menggerakkan dan mengintegrasikan pekerjaan bawahan (pegawai) agar mencapai tujuan organisasi, jadi pengertian dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, koordinasi merupakan kesatuan tindakan dan usaha yang dilakukan bersama, pengintegrasian antar satuan (unit kerja) dan keselarasan dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.

Unsur koordinasi yaitu fungsi yang berbeda, sumber dari potensi yang dimiliki suatu organisasi, kegiatan yang dilakukan dari setiap unit kerja, kesatu paduan keserasian dan arah yang sama merupakan faktor penting yang dibutuhkan dalam fungsi koordinasi suatu organisasi, dari sudut pandang manajemen diidentifikasi beberapa bentuk koordinasi seperti, sebagai berikut:

1. kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus berurutan, jika berurutan bagaimana urutannya koordinasi ini dilakukan terhadap antar unit kerja yang berhubungan dependen, kasual dan sebagainya.
2. Koordinasi ruang, koordinasi ruang dapat disebut juga koordinasi wilayah, koordinasi ini ditempuh bila kegiatan melalui berbagai daerah kerja.



3. Koordinasi struktural, yaitu koordinasi antara unit kerja yang berada dibawah struktur tertentu tanpa melalui superordinasi unit yang satu dan lain secara sukarela.
4. Koordinasi masukan-balik, oleh March dan Simin disebut coordination bay feedback, yaitu koordinasi hasil kontrol terhadap setiap kegiatan unit kerja agar dapat dilakukan adjustment, improvement dan koreksi.koordinasi bentuk forum bisa juga di lembagakan secara formal misalnya dalam bentuk musbang, rakorbang, konreg dan onnas, juga musrembang. (Ndara,2001,295-296). Koordinasi masukan-balik yaitu dengan adanya kontrol suatu unit kerja tentang pelaksanaan kegiatan dilakukan koreksi dan saling memberi masukan guna untuk memperbaiki kedepannya.

Adanya berbagai pekerjaan dan bagian-bagian serta unit-unit terkecil didalam suatu organisasi cenderung timbul kegiatan yang memisahkan diri dari tujuan organisasi sebagai keseluruhan. Oleh karena itu untuk mencegah hal yang demikian, haruslah ada usaha untuk mengembalikan gerak yang memisahkan diri melalui kegiatan koordinasi. Setiap koordinasi apapun bentuknya senantiasa akan berupaya dapat tercapainya tujuan organisasi yang bersangkutan dengan efektif dan efisien.

Efisiensi maupun efektivitas organisasi sangatlah tergantung pada baik buruknya pembangunan sumber daya manusia atau anggota organisasi itu sendiri. Ini berarti sumber daya manusia yang dalam organisasi secara profesional harus diberikan latihan dan pendidikan yang sebaik-baiknya bahkan sesempurna mungkin.

## **D. 2. Pemerintahan Desa**

Pemerintah desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa adalah kepala desa yang disebut dengan dan perangkat desa yang disebut dengan nama lain pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan desa. sejalan dengan itu, peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang juga mengartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.pembentukan desa tidak semata-mata karena keinginan perangkat desa yang berwenang mengatur seluruh kegiatan di desa, seperti hanya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembetulan desa adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diatur lanjut dalam PP Nomor 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP Nomor 47 tahun 2015 tentang aturan pelaksana Nomor 6 tahun 2014.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dalam melaksanakan tugas kepala desa berwenang

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d) Menetapkan peraturan desa
- e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f) Membina kehidupan masyarakat desa
- g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h) Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif
- i) Melaksanakan weweng yang sesuai dengan ketentuan peraturan

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu:

- a) Kepastian hukum
- b) Tertib menyelenggarakan pemerintahan
- c) Tertib kepentingan umum
- d) Keterbukaan

Dari penjelasan yang di ulas dalam Undang desa menjelaskan secara eksplisit dan relatif, desa secara nyata diberikan mantad oleh negara untuk mengurus dan mengatur sesuai dengan hak prakarsa masyarakat.

Pemerintah desa menurut suryaningrat, adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai penyelenggara masyarakat yang tanggung jawab dibidang pemerintah pembangunan kemasyarakatan dan urusan pemerintah umum termasuk pembinaan umum termasuk ketentraman dan ketertiban (kansil,1991: 197)

Selanjutnya pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa adalah alat atau organ-organ yang menjalankan tugas dan kewajiban pemerintahan sesuai dengan peraturan yang ditentukan demi mencapai suatu tujuan. Sedangkan perintah yang dilakukan untuk alat atau organ-organ yang sudah ditentukan demi mencapai tujuan.

Sedangkan menurut kansil, pemerintah desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan umum termasuk dalam pembinaan, ketentraman dan ketertiban pemerintah desa adalah perangkat atau kelengkapan yang berkedudukan dan memimpin pemerintahan di desa yang terdiri dari kepala desa beserta perangkat yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagai penyelenggaraan pemerintah desa termasuk juga pembinaan, ketentraman dan ketertiban (Kansil,1991: 197).

### **D.3. Pembangunan Desa**

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan pembangunan desa adalah “upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”

Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. “Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengharusutamaan perdamaian dan keadilan sosial” sebagaimana dinyatakan dalam pasal 78 ayat (3). ([http://desa.id/id\\_ID/wiki/pembangunan-desa-pembangunan-kawasan-perdesaan-dan-kerjasama-desa/pembangunan-desa](http://desa.id/id_ID/wiki/pembangunan-desa-pembangunan-kawasan-perdesaan-dan-kerjasama-desa/pembangunan-desa)).

Berdasarkan pasal 78 tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari: (i) perencanaan pembangunan desa; (ii) pelaksanaan pembangunan desa; (iii) pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa sebagai dasar penyusunan APD desa. penyusunan rencana desa itu dilakukan melalui Musrembang Desa yang mengikutsertakan masyarakat pasal 78 (1) pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.(2)  
pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.(3)  
pembangunan desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan  
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan  
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat dari melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengkomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada ditengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan papun bentuk setiap prgram pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa. Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisorel dari pusat-pusat pembangunan (*Centre of excellent*). Masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta serta penyebaran tenaga kerja produkti tidak seimbang, termasuk produktifitas, 2 tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semua itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan progran dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan

pembangunan desa. Namun demikian, program atau proyek diarahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan dijalankan jauh dari desa (Konten, 1988, 247). Masyarakat masih dianggap obyek/sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai subyek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan Partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil (Katasasmita, 1996, 144). Tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran atau fisik tanpa berperan secara luas sejak perencanaan sampai evaluasi. Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program dan proyek pembangunan, hal ini telah di atur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Konsep pembangunan desa sebagai proses perubahan yang terus menerus di kesinambungan dalam pencapaian tatanan masyarakat sejahtera, upaya konkrit pembangunan desa terus diupayakan sebagai landasan ketahanan desa di Indonesia. Selain itu peneliti ingin menggambarkan pelaksanaan pembangunan dari berbagai konsep pembangunan desa dan perngertiannya konsep pembangunan. (Todaro (2000: 18), menyatakan bahwa pembanguana bukan hanya fenomenasemata, namun pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro (2000: 20), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga kerja sama antar-

Desa meliputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan antar-desa, dan/atau sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

Berikut penjelasan peraturan pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang perencanaan pembangunan desa

1. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu menengah 6 (enam) tahun.
  - b. Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
2. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa.

Berikut program kegiatan dalam pembangunan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa.
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.



- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pendidikan dan kebudayaan.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan ekonomi.
- e. Pelestarian lingkungan.

Berikut penjelasan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan desa

- a. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota
- b. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.
- c. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
- d. Dalam rangka perencanaan dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- e. Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.

Pada pasal 6 pemendagri 114 Tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan Desa menjelaskan proses pembangunan desa atas dasar rancangan RPJM yang memuat visi dan misi pemerintah desa sebagai arah kebijakan pembangunan desa.

Simpulan dari pembangunan desa ialah pemerataan pembangunan yang di dasari kerja sama masyarakat dan pemerintah yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat sasaran pembangunan dan ruang lingkup pembangunannya, pembangunan desa seharusnya menerapkan konsep transparansi, dapat dinikmati masyarakat, juga dipertanggung jawabkan (*akuntabilitas*) dan keberlanjutan (*sustainable*).

#### **D. 4. Infrastruktur Desa**

##### **1. Definisi infrastruktur**

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas public yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg,1988) dalam (NSS Prapti, Suryawardana, & Triyani, 2015)

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau strukturstruktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg,2000) (Moteff 2003 dalam NSS Prapti, Suryawardana, & Triyani, 2015)mendefinisikan infrastruktur tidak hanya terbatas pada sudut pandang ekonomi melainkan juga pertahanan dan keberlanjutan pemerintah.

Vaughn and pollard (2003) dalam (NSS Prapti, Suryawardana, & Triyani, 2015), menyatakan infrastruktur secara umum meliputi jalan, jembatan, air dan sistem pembuangan, Bandar udara, pelabuhan, bangunan umum, dan juga termasuk sekolah, fasilitas kesehatan, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, kebakaran, tempat pembuangan sampah dan telekomunikasi.

Menurut Green dan Haines (dalam Adi, 2013;240) infrastruktur dapat berupa jalan raya, jembatan, jalan kereta api, sarana pembuangan limbah,sarana air bersih, jaringan telepon, dan lain sebagainya.

## **2. Jenis-jenis innfrastruktur**

Berdasarkan jenisnya, infrastruktur dibagi dalam 13 kategori (Grigg, 1988) dalam (Cakrawijaya, 2014, p. 140) yaitu:

- a. Sistem penyediaan air; waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, dan fasilitas pengolahan air.
- b. System pengelolaan air limbah; pengumpul, pengolahan, pembuangan, dan daur ulang.
- c. Fasilitas pengelolaan limbah (padat).
- d. Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi.
- e. Fasilitas lintas air dan navigasi.
- f. Fasilitas transportasi; jalan, rel Bandar udara, serta utilitas pelengkap lainnya.
- g. System transit public.
- h. System kelistrikan; gedung pemerintahan, dll.
- i. Fasilitas gas alam.

- j. Gedung public; sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan, dll.
- k. Fasilitas perumahan publik
- l. Taman kota; taman terbuka, plaza, dll serta,
- m. Fasilitas komunikasi.

Jenis-jenis infrastruktur tersebut menjadi dasar dalam pengelompokkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui Pedoman Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Jenis infrastruktur pedesaan yang menjadi cakupan pembiayaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan untuk tahun anggaran 2009, antara lain berupa;

- a. Jenis infrastruktur pedesaan yang menjadi cakupan pembiayaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan untuk tahun anggaran 2009, antara lain berupa;Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan dan jembatan pedesaan,
- b. Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan, berupa penyediaan air minum, dan sanitasi pedesaan (pedoman Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan,2006) dalam (Asnudin A., 2009, p.293)

### **3. Kriteria infrastruktur**

- a. Dalam memilih jenis infrastruktur yang akan dilaksanakan di desa sasaran PPIP 2009, harus mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain: Memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa,

- b. Langsung memberikan manfaat bagi masyarakat setempat terutama kelompok miskin,
- c. Penyediaan lahan untuk infrastruktur disediakan oleh masyarakat, dan
- d. Dapat dilaksanakan dan berfungsi pada tahun anggaran 2009, serta
- e. Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja setempat dan penggunaan material lokal, dan
- f. Penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat
- g. Merupakan infrastruktur yang dapat dikelola oleh masyarakat,
- h. Menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur yang dibangun,
- i. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya.

#### **E. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan terfokus dan tidak melebar, maka perlu adanya ruang lingkup dalam membatasi penelitian dengan judul Koordinasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa.

1. Koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa.
2. Koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
3. Koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pendukung wisata desa.
4. Koordinasi pemerintah desa dalam pelestarian lingkungan hidup.
5. Koordinasi pemerintah desa dalam pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi dan kesehatan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Untuk mengkaji karya ilmiah ini, penulis fokus pada penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Artinya penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan, yang dilakukan secara deskripsi. Deskripsi adalah gambaran berupa kata-kata dan bahasa (Moleong, 2018:6).

Dengan maksud bahwa jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni berusaha untuk mengungkapkan fakta dalam penelitian yang ada dan terjadi di lapangan dengan menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis dan akurat. Selanjutnya dianalisis dan disimpulkan serta mengkajinya berdasarkan metode ilmiah.

### **2. Unit analisis**

#### **a. Obyek Penelitian**

Objek penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut, Arikunto(2009:20). Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Terkait Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## b. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian. Karena tipe penelitian ini adalah kualitatif, maka penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Dalam teknik penentuan informan tersebut, jumlah informan tidak ditentukan sebelumnya, melainkan tergantung pada kebutuhan informasi yang ingin dicari. Bila informasi atau data yang diperoleh dipandang sudah mencakup kebutuhan analisis dan pembahasan, informan tidak ditambah lagi dengan demikian proses pengumpulan data selesai. Sebaiknya, bila informasi yang diperoleh dari sejumlah informan belum memenuhi kebutuhan yang diinginkan, jumlah informan ditambah lagi sampai kebutuhan data analisis dan pembahasan terpenuhi. Kuncinya adalah jika tidak ada lagi informasi yang dapat di jaring, maka penarikan informan diakhiri (Maleong, 2006:224- 225).

Subyek penelitian dalam hal ini adalah kepala desa, perangkat desa, Sekretaris desa, BPKAL, dan Masyarakat. Pemilihan narasumber berdasarkan pada pertimbangan dengan cara memilih beberapa informan yang dianggap dapat mewakili secara menyeluruh dari semua unsur yang ada. Pengambilan data seperti ini dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan data yang ada tanpa mengurangi validitas data tersebut. Informan dalam penelitian dengan karakteristik yang berbeda.

**Tabel 1.1**

**Subyek Penelitian**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Usia</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Status</b>
1.	Wahyu Nugroho	Laki-laki	34	Sarjana/S1	Kepala desa
2.	Mujimin	Laki-laki	40	Sarjana/S1	Sekretaris desa
3.	Nur cahyanto	Laki-laki	-	SLTA	Uluulu
4.	Dwi Santoso	Laki-laki	-	SLTA	Ketua BPKAL
5.	Mudjono	Laki-laki	68	SLTP	Tokoh masyarakat
6.	Norvatimah	Perempuan	48	SLTP	Masyarakat
7.	Saibani	Perempuan	45	SLTA	Masyarakat
8.	Fitri	Perempuan	37	SLTA	Masyarakat
9.	Tukiman	Laki-laki	51	SLTA	Jagabaya/ kepala bidang keamanan dan ketertiban Desa
10.	Giyatno	Laki-laki	38	SLTA	Direktur BUMDES
11.	Samidi	Laki-laki	43	SLTA	Anggota BPKAL
12.	Muhadi	Laki-laki	71	SD	Masyarakat

*Sumber: Data primer tahun 2021*

c. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta



### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi disebut pula sebagai pengamatan merupakan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup saat itu, menangkap kehidupan budaya dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu (Moleong, 2018: 175). Observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu pengamatan dari peneliti untuk melihat, mendengar dan mencermati secara langsung obyek penelitian yang akan dikaji yakni yang berkaitan dengan Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2018:186). Sehingga wawancara merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber informan berdasarkan obyek penelitian.

Wawancara diperlukan untuk mendukung hasil pengamatan lapangan seperti realisasi program kegiatan, hasil program kegiatan dan keterlibatan warga masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini yang berkaitan dengan judul penelitian yakni Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai sumber data, karena dalam banyak hal dokumen dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2018: 217). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data secara terperinci dengan melihat dan mencatat dengan gambar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga peneliti dapat memanfaatkan data baik dokumen tertulis maupun tidak tertulis seperti gambar dan electronic sebagai bahan untuk menghimpun dan menganalisis data. Dokumen-dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian.

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun tidak tertulis seperti gambar dan electronic. Dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian seperti pada penelitian yang dilakukan penulis dengan meneliti tentang Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2008:244), teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Peneliti kemudian akan mengatur urutan data, mengorganisir ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian-uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Menurut Miles dan Huberman dalam buku yang sama, terdapat tiga tahapan analisis data kualitatif:

a) Pengumpulandata

Menurut Moloeng (2007:287) pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat.

b) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

c) Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini adalah berbentuk teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

d) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN SAMBIREJO, KAPANEWON PRAMBANAN, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

#### **A. Kondisi Geografis**

##### **1. Kondisi Fisik**

Desa Sambirejo merupakan desa bagian dari Kecamatan Prambanan dengan jarak dari Kecamatan Prambanan sejauh 6 km dari arah tenggara Kecamatan Prambanan dan 35 km dari arah timur ibu kota Kabupaten Sleman yang menempati areal perbukitan berbatu, kering dan merupakan lahan kritis dengan kondisi jalan 90% menanjak dengan ketinggian 1500-2000 dari permukaan laut, dengan curah hujan 2000-3000 mm/tahun dan suhu udara rata-rata 23-32<sup>o</sup>C. Desa Sambirejo yang berada pada perbukitan dan batuan Breksi

Desa Sambirejo juga berbatasan langsung dengan beberapa desa seperti pada bagian sebelah utara berbatasan dengan Desa Pereng, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberharjo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Katekan, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Madurejo.

Desa Sambirejo terdiri dari delapan pedukuhan yaitu Dusun Sumberwatu, Dusun Dawangsari, Dusun Kikis, Dusun Gedang, Dusun Mlakan, Dusun Gunungcilik, Dusun Gunungsari dan Dusun Nglengkong. Dari setiap pedukuhan meliputi:

- a. Dusun Sumberwatu, terdiri dari empat Rukun Tetangga (RT) dan dua Rukun Warga (RW);
- b. Dusun Dawangsari, terdiri dari empat Rukun Tetangga (RT) dan dua Rukun Warga (RW);
- c. Dusun Kikis, terdiri dari tujuh Rukun Tetangga (RT) dan tiga Rukun Warga (RW);
- d. Dusun Gedang terdiri dari lima, Rukun Tetangga (RT) dan terdiri dari dua Rukun Warga (RW);
- e. Dusun Mlakan, terdiri dari lima Rukun Tetangga (RT) dan terdiri dari dua Rukun Warga;
- f. Dusun Gunungcilik, terdiri dari lima Rukun Tetangga (RT) dan terdiri dari dua Rukun Warga (RW);
- g. Dusun Gunungsari, terdiri dari delapan Rukun Tetangga (RT) dan terdiri dari tiga Rukun Warga (RW)';
- h. Dusun Nglengkong, terdiri dari tujuh Rukun Tetangga (RT) dan tiga Rukun Warga (RW);

Dari kedelapan pedukuhan di atas memiliki perbedaan jumlah RT dan RW luas masing-masing dari pedukuhanpun berbeda-beda. Perbedaan jumlah RT dan RW dari setiap pedukuhan dikarenakan adanya perbedaan luas wilayah dan tingkat kepadatan penduduk dari setiap pedukuhan yang ada.

## 2. Kondisi Iklim

Desa Sambirejo yang berada pada perbukitan menyebabkan Desa Sambirejo memiliki cuaca yang dominan sejuk dengan rata-rata curah hujan pertahunnya mencapai 2.000,00 mm, musim hujan dalam hitungan bulan selama 6 bulan. Tingkat kelembapan berada pada angka 80.00 dan suhu rata-rata harian di Desa Sambirejo ada di 28,00 °C, serta ketinggian dari permukaan laut ada di 150,00 mdl.

### B. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas tanah atau wilayah Desa Sambirejo secara keseluruhan yaitu 839.64 Ha.

Dibagi menurut penggunaan yaitu:

**Tabel 2. 1**

**Data Pembagian Penggunaan Tanah Desa Sambirejo**

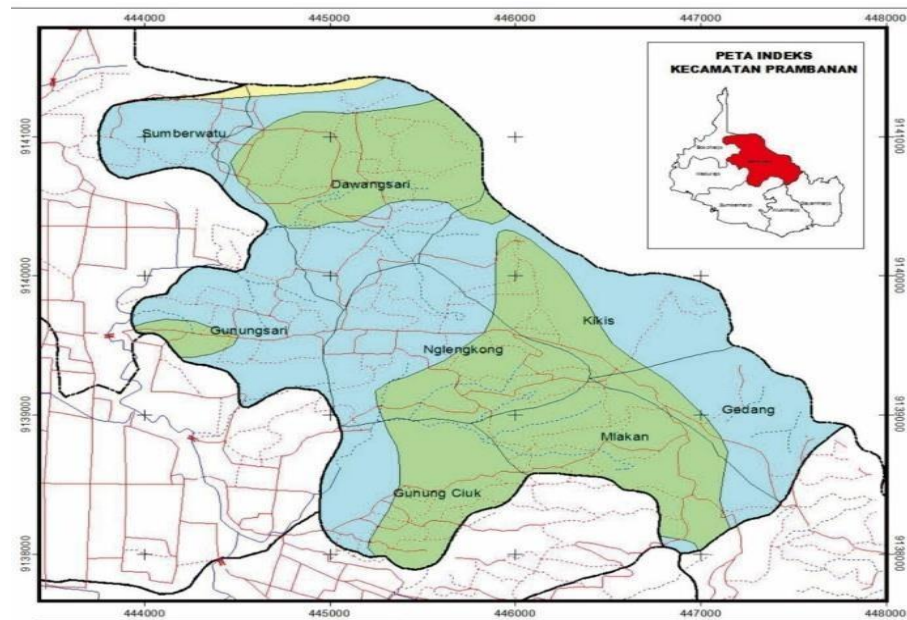
No	Keterangan	Luas (Ha)
1	Luas Tanah Sawah	17,300
2	Luas Tanah Kering	48,413
3	Luas Tanah Basah	000
4	Luas Tanah Perkebunan	000
5	Luas Tanah Umum	751
6	Luas Tanah Penambangan Galian C	6,325
7	Luas Tanah Tempat Wisata	5,605
8	Luas tanah Perkantoran	04,200
9	Luas Tanah Wakaf	01,163
10	Luas Hutan	17,400
11	Luas Tanah Perkarangan Warga	2,398,505

*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Berdasarkan pada Tabel 2.1 di atas, menggambarkan bahwa Desa Sambirejo dari penggunaan tanah lebih banyak menggunakan tanah mereka sebagai kawasan perkarangan rumah warga. Luas tanah hutan yang mencapai 17.400 Ha menunjukkan

bahwa Desa Sambirejo memiliki hutan yang cukup luas hal ini menginformasikan bahwa kualitas udara yang berada di Desa Sambirejo dalam kondisi baik atau tidak tercemar. Luas tanah untuk tanah basah tidak ada di Desa Sambirejo karena memang desa Sambirejo berada pada perbukitan atau dataran tinggi. Luas tanah yang digunakan untuk pariwisata cukup luas karena ada dua wisata yang terkenal di Desa Sambirejo yaitu wisata Tebing Breksi dan Candi Ijo, jadi luas tanah untuk wisata sebesar 5,605 Ha meliputi kedua tempat wisata tersebut.

Berikut gambaran peta dari Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, DIY



Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019

Gambar 1 1 Peta Desa Sambirejo



### C. Demografi

Jumlah penduduk Desa Sambirejo berdasar pada rekapan pendataan penduduk terakhir di tahun 2020 yaitu 5.678 jiwa, dari jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.972 KK dan kepadatan penduduk sebesar 668,38/km yang tersebar di delapandusun. Adapun jumlah penduduk berdasarkan pada penggolongan dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	2.828	50,4
2	Perempuan	2.784	49,6
<b>Total</b>		<b>5.612</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Data pada tabel 2.2 menunjukkan dari total jumlah penduduk antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, penduduk laki-laki merupakan sebagai penduduk mayoritas di Desa Saambirejo. Meskipun perselisihan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan tidak begitu jauh. Ada 50,4% penduduk laki-laki dan 49,6% penduduk perempuan dengan total penduduk laki-laki sebesar 2.828 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 2.784 jiwa.

**Tabel 2. 3****Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	Balita	421	7,5
2	Anak-anak	706	12,6
3	Remaja	909	16,2
4	Dewasa	1.854	33,0
5	Usia Lanjut	1.722	30,7
<b>Total</b>		<b>5.612</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019

Berdasarkan pada tabel 2.3 menunjukkan bahwa penduduk Desa Sambirejo didominasi oleh penduduk usia dewasa dengan jumlah penduduk terkecil yaitu dari kelompok penduduk balita. Usia lanjut juga lebih banyak daripada usia remaja yaitu usia remaja hanya 16.2%, sedangkan usia lanjut sebanyak 30,7% hanya terpaut sedikit dari usia dewasa. Hal ini menunjukkan usia remaja dan belita merupakan kelompok usia yang sedikit di Desa Sambirejo. Tingkat usia produktif terlihat dari tabel lebih dominan dibandingkan usia lainnya yaitu usia dewasa sebesar 1,854 jiwa.

**Tabel 2. 4****Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Persentase (%)
		L	P		
1	TK/PAUD	173	166	339	7,85
2	Tidak Tamat Sekolah	226	201	427	9,88
3	Tamat SD	637	631	1.268	29,36
4	Tamat SMP	448	450	898	20,79
5	Tamat SMA	730	607	1.337	30,95
6	Tamat D2	2	3	5	0,12
7	Tamat D3	8	11	19	0,44
8	Tamat S1	11	14	24	0,56
9	Tamat S2	1	1	2	0,05
<b>Total</b>		<b>2.236</b>	<b>2.084</b>	<b>4.320</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019

Dari data pada tabel 2.4 jumlah penduduk berdasarkan pada tingkat pendidikan menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Sambirejo adalah mayoritas tingkat SLTA. Dapat diartikan sumber daya pendidikan di Desa Sambirejo adalah mayoritas lulusan SLTA. Sedangkan tingkat pendidikan terendah adalah tingkat S2. Tingkat yang tidak tamat sekolah juga cukup tinggi yaitu sekitar 9.88% tidak sekolah terhitung dari tiga kelompok yaitu yang belum sekolah, tidak pernah sekolah dan tidak lulus sekolah. Sehingga membuat angka yang tidak sekolah menjadi cukup tinggi. Lulusan D2, D3 dan S1 dari tabel 2.4 menunjukkan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki sebagai lulusan sarjana. Sebagai lulusan SD juga cukup besar yaitu 29.36%. Lulusan SD banyak diisi oleh penduduk angkatan tua dimana pendidikan masih sangat sukar untuk sekala desa pada masa itu. Sehingga banyak dari penduduk angkatan tua yang hanya menempuh pendidikan sampai pada tingkat SD.

**Tabel 2. 5****Jumlah Penduduk Berdasarkan Pada Mata Pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		L	P		
1	Petani	750	520	1.270	29,12
2	Buruh Tani	185	85	270	6,19
3	Apartur Sipil Negara (ASN)	47	3	50	1,15
4	Pedagang Barang Klontong	250	153	403	9,24
5	TNI	2	0	2	0,05
6	POLRI	2	0	2	0,05
7	Penambang	75	0	75	1,72
8	Tukang Kayu	225	0	225	5,16
9	Tukang Batu	100	0	100	2,29
10	Karyawan Perusahaan Swasta	45	30	75	1,72
11	Wiraswasta	21	19	40	0,92
12	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	350	224	574	13,16
13	Pensiunan	15	0	15	0,34
14	Buruh Harian lepas	885	365	1.250	28,66
15	Juru Masak	1	0	1	0,02
16	Satpam	10	0	10	0,23
<b>Total</b>		<b>2.963</b>	<b>1.399</b>	<b>4.362</b>	<b>100.00</b>

Sumber: *Arsip Desa Sambirejo 2019*

Dari tabel 2.5 diketahui bahwa jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani adalah sebagai mata pencaharian terbesar di Desa Sambirejo. Kemudian disusul dengan mata pencaharian sebagai buruh lepas. Sedangkan untuk mata pencaharian yang paling kecil yaitu sebagai juru masak. Tidak mempunyai pekerjaan tetap cukup hingga mencapai 13,16% hal ini menunjukkan lebih banyak yang tidak bekerja dibandingkan yang bekerja tetap. Dari tabel tidak menunjukkan adanya pekerjaan masyarakat pada sektor pariwisata, seharusnya dengan hadirnya unit usaha wisata Tebing Breksi banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa

Sambirejo. Akan tetapi belum tercatat sebagai salah satu mata pencaharian baru bagi masyarakat desa. Adapun pedagang toko kelontong sebagai salah satu jenis mata pencaharian yang cukup tinggi, hal ini berkaitan erat dengan hadirnya unit usaha wisata Tebing Breksi sebagai moto penggerak perekonomian masyarakat desa.

**Tabel 2. 6**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama**

No	Agama	Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		L	P		
1	Islam	2.829	2.751	5.580	99,43
2	Protestan	0	0	0	0,00
3	Katholik	15	12	27	0,48
4	Hindu	5	0	5	0,09
5	Budha	0	0	0	0,00
6	Konghucu	0	0	0	0,00
<b>Total</b>		<b>2.849</b>	<b>2.763</b>	<b>5.612</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Dari tabel 2.6 diketahui bahwa mayoritas dari penduduk Desa Sambirejo berdasarkan pada pemeluk agama adalah pemeluk agama Islam. Hindu sebagai penduduk dengan jumlah pemeluk agama terkecil di Desa Sambirejo. Katholik sebagai agama kedua setelah agama Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Sambirejo. Budha, Protestan, dan Konghucu belum ada masyarakat Desa Sambirejo yang memeluk ketiga agama tersebut.

**D. Kondisi Sosial Budaya**

Desa Sambirejo menyimpan dan menjaga beberapa kesenian dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Diantara kesenian tersebut ada kesenian yang sangat populer

di kalangan masyarakat Sambirejo hingga saat ini. Jathilan merupakan kebudayaan yang masih kerap kali dipertunjukkan di Desa Sambirejo. Tarian Jathilan dikenal sebagai tarian yang paling tua di tanah Jawa. Tarian ini menggambarkan tentang kegagahan seorang prajurit dalam menunggang kuda dan membawa pedang yang siap tempur di medan perang. Kesenian ini hingga sekarang tetap dijalankan oleh masyarakat Sambirejo.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Sambirejo sangat terbuka terhadap orang asing yang baru masuk ke wilayah mereka. Karakter ini terbentuk karena memang salah satu karakter masyarakat Jawa adalah ramah dan pemurah terhadap orang lain. Salah satu hal yang menuntut masyarakat untuk mengubah dan memperhalus sikap mereka terhadap orang baru yang masuk ke desa mereka adalah karena Desa Sambirejo memiliki beberapa tempat wisata seperti dua tempat wisata yang sangat populer yang ada di Desa Sambirejo yaitu wisata Tebing Breksi dan Candi Ijo. Kedua tempat ini menjadi medan magnet yang menarik orang dari luar untuk masuk ke Desa Sambirejo. Sehingga pelan-pelan masyarakat Sambirejo terbiasa dengan kedatangan masyarakat asing yang masuk ke desa mereka.

Adapun beberapa adat yang kerap kali dijalankan oleh masyarakat Sambirejo dengan menjalankan upacara-upacara adat, di antara upacara adat yang sering dijalankan di Desa Sambirejo:

1. Upacara puputan, yaitu upacara selamat pada saat tali pusar bayi sudah lepas/mengering.

2. Jagongan, yaitu upacara wungon (tidak tidur untuk semalam suntuk) atau bertandang di rumah keluarga yang baru melahirkan bayi pada malam hari selama kurang lebih 7 malam (satu minggu).
3. Upacara kematian, dari surtanah, upacara kenduri tiga hari, tujuh hari, 40 hari, setahun, dua tahun sampai 1000 hari.
4. Upacara khitanan, yaitu tanda bahwa anak lelaki sudah mulai menginjak aqil balig berangkat menjadi laki-laki dewasa.
5. Upacara pernikahan, dengan berbagai urutan pernak pernik tradisi jawa, seperti siraman, midodareni, ijab, panggih dan resepsi.
6. Upacara Mitoni, yaitu selamatan pada saat usia kehamilan mencapai genap tujuh bulan.
7. Selapanan, yaitu acara kenduri atau Selamatan bertepatan dengan usia bayi 35 (tiga puluh lima hari) sebagai ungkapan rasa syukur.
8. Upacara Bersih Dusun/ Rasulan menandakan kesyukuran Kepada Yang Maha Esa bahwa setelah Menanam semua tanaman pada musim hujan dan telah membuahkan hasil/ panen.
9. Musyawarah Adat, bentuk diskusi masyarakat dalam balutan budaya dan adat istiadat yang berjalan di Desa Sambirejo
10. Sanksi Adat, berupa hukuman bagi pelanggar adat dan akan diberikansesuai dengan sanksi adat yang berlaku di Desa Sambirejo
11. Upacara adat sebelum membangun rumah

Desa Sambirejo juga termasuk desa yang banyak menyimpan sisa peradaban manusia sebelumnya seperti candi dan situs-situs budaya lainnya. Sisa peninggalan aktivitas bumi sejak meliaran tahun yang lalu juga masih terekam di Desa Sambirejo. Salah satunya situs geologi dan telah ditetapkan sebagai situs purba oleh Badan Geologi Indonesia yaitu Batu Breksi sebagai situs peninggalan bekas sisa letusan gunung api purba berdasarkan pada pembuktian oleh Badan Geologi Indonesia. Hingga sekarang Batu tersebut masih dapat dinikmati karena telah berubah menjadi tempat wisata yang dikenal dengan sebutan wisata Batu Breksi.

Adapun beberapa situs kebudayaan yang ada di Desa Sambirejo diantaranya Candi Barong yang terletak di dusun Sumberwatu, candi Ijo terletak di dusun Nglengkong, Candi Miri terletak di Dusun Dawangsari, Situs Gupolo, Candi Tinjon di Gunungsari. Candi Barong merupakan candi yang menempati posisi paling utara dari keseluruhan kompleks candi yang ada di wilayah Desa Sambirejo.

## **E. Ekonomi Desa dan Masyarakat Desa**

### **1. Sektor Ekonomi**

Ekonomi desa dimulai sejak tahun 2016 yaitu sejak berdirinya BUM Desa yang kini sudah menaungi lima unit usaha termasuk salah satu unit usaha BUM Desa yang paling produktif yaitu wisata Tebing Breksi. Sebelumnya masyarakat memulai aktivitas ekonomi secara mandiri di masing-masing sektor. Sektor ekonomi masyarakat sebelumnya lebih dominan pada penambangan batu atau galian batu, kemudian lainnya terbagi ke beberapa sektor seperti, pertanian, industri rumahan,



pariwisata, dan pemanfaatan hutan oleh sebagian masyarakat. Setelah hadirnya wisata Tebing Breksi pada tahun 2015 dan sebelumnya juga aktivitas pertambangan sudah diberhentikan sejak tahun 2014, titik pemberhentian kegiatan penambangan hanya diberhentikan di Tebing Breksi adapun tempat lainnya di dusun lain masih tetap berlanjut. Pelan-pelan banyak masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai penambang beralih pekerjaan menjadi pengelola wisata Tebing Breksi yang menyediakan barang dan jasa di Tebing Breksi.

Adapun sektor perekonomian masyarakat ini tersebar di beberapa dusun seperti Gunungsari, Mlakan dan Nglengkong berikut rincian tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.7**  
**Penambangan Batu Galian C**

No	Lokasi Aktivitas	Potensi
1	Sumberwatu	Tambang Batu Putih
2	Dawang Sari	-
3	Kikis	-
4	Gedang	Tambang batu balok dan Kerajinan
5	Mlakan	Tambang Batu Putih
6	Gunungcilik	Batu alam, Batu batako, Batu balok, dan Batu putih
7	Gunungsari	Batu Pecah
8	Ngelengkong	Batu alam, Batu balok, Batu bengkok dan Batu putih

*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Dari data tabel 2.8 diketahui bahwa masih banyak masyarakat memanfaatkan sumber daya alam batu. Kondisi desa yang berada di perbukitan dan menyimpan potensi batu alam membuat banyak masyarakat memanfaatkan batu sebagai salah satu komoditi mata pencaharian masyarakat.

Pada sektor ini ada sebagian masyarakat memilih menjadi peternak beberapa hewan sebagai berikut:

- a. Sapi sebagai kepemilikan pribadi dan kelompok;
- b. Kambing sebagai kepemilikan mandiri;
- c. Ayam kampung dalam bentuk peternakan;
- d. Ayam Broiler dalam bentuk peternakan;
- e. Mentok dalam bentuk peternakan;
- f. Burung dalam bentuk peternakan dan kepemilikan pribadi;
- g. Ayam Jawa super dalam bentuk peternakan;

Pada sektor ini masyarakat terbagi menjadi beberapa sektor tentang peternakan, ada masyarakat yang memiliki hewan ternak sebagai kepemilikan pribadi ada pula kepemilikan hewan ternak ke dalam bentuk kelompok. Sehingga ada terbentuk kelompok peternak sebagai kumpulan peternak di dalam Desa Sambirejo. Seperti ternak unggas sebagai bentuk usaha ternak yang dimiliki masyarakat desa yang memang mengembangkan usaha ternak.

## **2. Usaha Jasa Keterampilan**

Usaha pada bidang jasa dan keterampilan Desa Sambirejo memiliki beberapa bidang jasa diantaranya:

- a. Tukang batu sebanyak 175 penyedia jasa keterampilan;
- b. Tukang jahit/bordir sebanyak 7 penyedia jasa keterampilan;
- c. Tukang pijat sebanyak 8 penyedia jasa dan keterampilan;

Pada sektor penyediaan jasa keterampilan Desa Sambirejo memiliki tiga sektor penyedia jasa keterampilan yang meliputi tukang batu, tukang jahit, dan tukang pijat. Tukang batu termasuk di dalamnya juga pengerajin batu, buruh batu, dan tukang batu balok.

### 3. Lembaga Ekonomi, dan Usaha Desa/Kelurahan

Lembaga Ekonomi desa, Desa Sambirejo sendiri memiliki beberapa unit usaha seperti BUM Desa dan Kelompok Simpan Pinjam. Berikut dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 8**

**Lembaga ekonomi dan usaha desa**

No	Jenis Unit	Jumlah (Unit)
1	BUM Desa	5
2	Simpan Pinjam	16
Total		20

*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Dari data tabel 2.9 diketahui Desa Sambirejo memiliki beberapa unit usaha yang digunakan sebagai penghasil pendapatan asli desa (PA Desa). Ada 16 unit simpan pinjam yang biasa digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Serta ada satu BUM Desa yang memiliki 5 unit usaha, diantara unit usaha yang dimiliki BUM Desa yaitu wisata Tebing Breksi, Toko desa, Pinjaman modal, dan dua tempat wisata sejenis Tebing Breksi yang masih dalam proses pengembangan.

#### 4. Sektor kehutanan dan batuan alam

Pada sektor ini Desa Sambirejo memiliki potensi hutan, tanaman kayu jati seluas 0,5 ha dan sono keling 5 ha. Sedangkan untuk batuan alam Desa Sambirejo memiliki tambang batu putih seluas 26,235 ha (Data Monografi Desa Sambirejo 2018)

Dari data terlihat Desa Sambirejo lebih didominasi oleh daerah batuan putih dan hanya sedikit tanah yang digunakan sebagai tanaman kayu jati yaitu hanyasebesar 0,5 ha. Oleh karena itu sebagian besar kaum pria di desa berprofesi sebagai penambang batu atau pengerajin batu.

#### 5. Prasarana dan Sarana

Sarana dan Prasarana yang terdapat di Desa Sambirejo yaitu meliputi:

- a. Home Industri sebanyak 38 unit;
- b. Penggergajian batu alam sebanyak 24 unit;
- c. Batik jumputan sebanyak 1 unit;

Prasarana dan sarana yang ada digunakan masyarakat sebagai wadah bagi masyarakat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Sambirejo. Keberadaan home industri sebanyak 38 unit menunjukan bahwa Desa Sambirejo cukup baik dalam segi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena keberadaan home industri dapat merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

## F. Pemerintahan

### 1. Pegawai Pemerintah Desa

Sebagai berikut jumlah pagawai pemerintah desa yang masih aktif bekerja di Pemerintahan Desa Sambirejo. Dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 2. 9**

**Jumlah pagawai pemeritahan desa**

No	Jenis Pagawai	Jumlah (orang)
1	Aparat desa	16
2	Perangkat desa	16
3	Staf	5
Total		37

*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Tabel 2.10 telah memberikan informasi bahwa jumlah dari pemerintah desa yang aktif dan menjalankan roda pemerintahan di Desa Sambirejo. Aparat, perangkat, dan staf yang berjumlah dari keseluruhan sebanyak 37 pegawai. Setiap pagawai memiliki tugas masing-masing sesuai dengan pemilihan dan pengangkat di dalam tubuh Pemerintaha Desa Sambirejo. Bagi pemerintah desa itu juga dapat tergambarkan tentang bagaimana profil dari para pagawai yang menjalankan roda pemerintahan.

### 2. Tingkat pendidikan pagawai desa

Tingkat pendidikan dari aparatur, perangkat, dan staf dapat dilihat melalui tabel sebai berikut:

**Tabel 2. 10**

**Sumber daya pendidikan dari aparatur, perangkat, dan staf Pemerintah Desa Sambirejo.**

<b>No</b>	<b>Jenis Pegawai</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>
1	Kepala Desa/Lurah	SLTA
2	Sekretaris	S1
3	Kepala Urusan Pemerintahan	SLTA
4	Kepala Urusan Pembangunan	SLTP
5	Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat	SD
6	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	SLTA
7	Kepala Urusan Umum	SLTA
8	Kepala Urusan Keuangan	SLTA

*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Dari tabel 2.11 diketahui sebagai pendidikan mayoritas dari pagawai desa di Desa Sambirejo ialah pendidikan SLTA. Untuk pendidikan lainnya seperti SLTP, SD, dan S1 masing-masing ada satu. Terlihat dari tabel potensi dari pagawai desa sudah cukup baik karena sudah diisi oleh sebagian pagawai yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik. Meskipun masih ada satu dari salah satu kepala urusan yang memiliki tingkat pendidikan SD.

**G. Badan Permusyawaratan Desa**

Bada Pemusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai lembaga legislatif setingkat desa, keberadaan BPD sebagai mitra sekaligus pengawas terhadapberjalannya roda pemerintahan desa. Fungsi BPD sangat penting dalam hal keberlangsungan demokrasi di desa BPD sebagai lembaga formal bagi masyarakat

desa untuk menyampaikan kritik mereka terhadap berbagai aktivitas dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerihan desa.

Desa Sambirejo memiliki BPD yang terdiri atas ketua, wakil, dan anggota. Adapun sebagai berikut BPD dari Desa Sambirejo. BPD sambirejo dapat terlihat melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 11**  
**BPD (Badan Pemusyaratan Desa)**

No	Jabatan	Pendidikan
1	Ketua	SLTA
2	Wakil Ketua	SLTA
3	Sekretaris	SLTA
4	Anggota	SLTA
5	Anggota	SLTA
6	Anggota	SLTA
7	Anggota	SLTP
8	Anggota	SLTA
9	Anggota	SLTA
10	Anggota	SLTA

*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Dari data yang tercatat pada tabel 2.12 diketahui bahwa pendidikan mayoritas dari ketua hingga anggota dari BPD Desa Sambirejo mayoritas berpendidikan setingkat SLTA. Hanya ada satu dari anggota BPD yang memiliki tingkat pendidikan setingkat SLTP. Dari data diketahui kualitas sumber daya yang menempati jabatan BPD di Desa Sambirejo sudah cukup baik karena mayoritas diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan setingkat SLTA.

## H. Organisasi

Organisasi di Desa Sambirejo terbagi kedalam dua kelompok yaitu organisasi yang dikelola oleh pemerintah desa melalui lembaga yang telah dibentuk kemudian organisasi yang memang benar-benar dari masyarakat. Daftar organisas tersebut dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 12**  
**Organisasi yang ada di Desa Sambirejo**

No	Nama Organisasi	Jumlah Organisasi	Jumlah Anggota (orang)
1	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD)	1	10
2	PKK	1	7
3	RW	19	19
4	RT	45	45
5	Kelompok Tani/Ternak	1	10
6	BUM Desa	1	5

*Sumber: Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Dari tabel 2.12 diketahui bahwa Desa Sambirejo memiliki sebanyak 6 organisasi. Sambirejo memiliki 19 RW dan 45 RT yang tersebar diseluruh dusun di Desa Sambirejo. Sambirejo juga memiliki organisasi PKK yang biasa sebagai wadah bagi perempuan untuk berorganisasi di dalam desa atau memperdayakan perempuan di desa. Satu kelompok tani dan ternak sebagai wadah bagi para petani dan peternak untuk meningkatkan hasil peternakan mereka dan peternian mereka, serta penjamin kesejahteraan anggota kelompok tani dan ternak. Terakhir satu organisasi ekonomi yang dikenal di tingkat desa dengan sebutan BUM Desa. BUM Desa hadir di desa



sebagai wadah usaha bagi desa untuk meningkatkan perekonomian di desa dan mempercepat pemerataan ekonomi di desa.

## I. Prasarana dan Sarana

Prasarana dan Sarana yang ada di Desa Sambirejo meliputi banyak bagian dan unit mulai dari milik pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, dan fasilitas publik. Prasarana dan sarana Desa Sambirejo dapat dilihat melalui tabel-tabel berikut:

**Tabel 2. 13**

### **Prasarana dan sarana pemerintahan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jumlah (Unit)</b>	<b>Kondisi</b>
1	Kantor Desa	1	Baik
2	Ruang Kerja	6	Baik
3	Mesin Ketik	2	Baik
4	Kendaraan Dinas	6	Baik

*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Dari data 2.13 didapat Prasarana dan Sarana dari pemerintah desa cukup baik, terlihat dari kondisi kantor Desa Sambirejo yang memiliki 6 ruangan kerja hal ini menunjukkan luas dari bangun kantor yang cukup luas. Alat administrasi seperti mesin ketik sebanyak 2 unit dan sebanyak 6 unit kendaraan dinas yang tentunya sangat membantu apabila ada kegiatan dinas dari setiap pegawai desa.

**Tabel 2. 14**

### **Prasarana dan saran BPD**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
1	Gedung	0	-
2	Ruang	1	Baik
3	Kandaraan	0	-

*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Dari data tabel 2.14 prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BPD lebih sedikit dibandingkan Pemerintahan desa. BPD hanya memiliki satu ruang kerja yang tergabung di gedung yang sama dengan unit-unit kerja desa lainnya. Sebenarnya BPD ini salah satu lembaga penting di dalam desa sudah selayak juga mendapatkan alat penunjang seperti prasarana dan sarana yang sama selayaknya seperti yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa.

**Tabel 2.15**

**Prasarana dan sarana LKD/LK**

No	Nama	Jumlah	Kondisi
1	<b>PKK</b>		
	Gedung	1	Baik
	Peralatan Kantor	1	Baik
	Buku administrasi	1	Baik
2	<b>Karang Taruna</b>		
	Pengurusan	1	Baik
	Buku administrasi	1	Baik
3	<b>Lembaga adat</b>		
	-	0	0
4	<b>BUM Desa</b>		
	Runag Kerja	1	Baik
	Kepengurusan	1	Baik
	Buku Administrasi	1	Baik

*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Dari data tabel 2.15 menunjukkan ada lembaga kemasyarakatan yang aktif dengan kegiatannya di dalam Desa Sambirejo. Dari sisi Prasarana dan Sarana memang tidak begitu bagus untuk menunjang kegiatan dari setiap lembaga kemasyarakatan. BUM Desa sendiri belum memiliki kantor sendiri dan masih tergabung dengan gedung unit kerja Pemerintahan Desa Sambirejo di gedung yang sama. Lembaga adat tidak mendapatkan fasilitas apapun untuk menunjang kegiatan,

hal ini sangat disayangkan mengingat pentingnya lembaga adat di dalam sebuah desa untuk menjaga nilai-nilai keasrian dari sebuah desa.

**Tabel 2. 16**  
**Pribadatan**

No	Nama	Jumlah (unit)	Kondisi
1	Masjid	12	Baik
2	Langgar/Surau/Mushola	6	Baik
3	Pura	1	Baik

*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Dari tabel 2.16 didapat bahwa jumlah dari prasarana dan sarana rumah ibadah umat Muslim menjadi yang paling banyak. Hal ini sejalan dengan data jumlah penduduk dengan mendasarkan pada jumlah pemeluk agama dan data menunjukkan pemeluk agama Islam sebagai agama mayoritas di Desa Sambirejo dan kemudian disusul oleh agama Khatolik dan yang terkecil yaitu dari agama Hindu. 1 unit Pura sebagai tempat peribadatan agama Hindu.

**Tabel 2.17**

**Prasarana dan sarana olah raga**

No	Nama	Jumlah (unit)	Kondisi
1	Lapangan Bulu Tangkis	5	Baik
2	Meja Pingpong	1	Baik
3	Lapangan Voli	6	Baik

*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Dari data tabel 2.17 menunjukkan lapangan voli sebagai prasarana dan sarana olah raga terbanyak yang ada di Desa Sambirejo yaitu sebanyak 6 unit. Kemudian lapangan bulu tangkis sebanyak 5 unit dan hanya ada 1 unit meja pingpong. Sarana

olah raga penting adanya di dalam sebuah desa sebagai hiburan bagi masyarakat dan sebagai wadah untuk mempertemukan dan menyatukan masyarakat.

**Tabel 2. 18**  
**Prasarana dan sarana kesehatan**

No	Nama	Jumlah (unit)	Kondisi
1	Puskesmas Pembantu	1	Baik
2	Posyandu	10	Baik
3	Bidan	1	Baik
4	Dukun Bersalin Terlatih	5	Baik

*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Dari tabel 2.18 prasarana dan sarana kesehatan masyarakat yang dimiliki Desa Sambirejo sudah mencukupi yaitu ada satu unit puskesmas pembantu, sepuluh unit posyandu, dengan satu orang bidan. Ada sebanyak lima orang dukun beranak, data dukun beranak lebih dominan dari pada bidan hal ini menunjukkan masyarakat Desa Sambirejo masih banyak yang menggunakan jasa dukun beranak pada saat bersalin.

**Tabel 2. 19**  
**Prasarana dan sarana pendidikan**

No	Nama	Jumlah (unit)	Kondisi
1	Gedung SMP	1	Baik
2	Gedung SD	2	Baik
3	Gedung TK	1	Baik

*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Dari data 2.20 menunjukkan prasarana dan sarana pendidikan yang ada didalam desa hanya ada dari mulai TK hingga sampai pada SLTP yang artinya tidak ada gedung SLTA. Sehingga hal ini memaksa anak-anak usia pendidikan SLTA di Desa Sambirejo untuk keluar dari desa apabila ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang setingkat SLTA.

**Tabel 2. 20**

**Prasarana dan sarana hiburan dan wisata**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
1	Tempat Wisata	7	Baik
2	Restoran	1	Baik

*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Data tabel dari 2.21 menunjukkan bahwa Desa Sambirejo sebagai desa yang memiliki banyak tempat wisata serta menawarkan keindahan alam dan wisata budaya. Desa Sambirejo memiliki dua tempat wisata yang paling populer saat ini yaitu wisata Tebing Breksi dan Candi Ijo, kedua tempat ini memiliki daya tarik yang unik dan menarik sehingga menarik banyak wisatawan untuk berkunjung ke kedua tempat wisata ini.

**Tabel 2. 21**

**Prasarana dan sarana kebersihan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jumlah (unit)</b>	<b>Kondisi</b>
1	Tong Sampah	16	Baik
3	Pengelolaan Sampah Lingkungan/RT	9.999	Baik

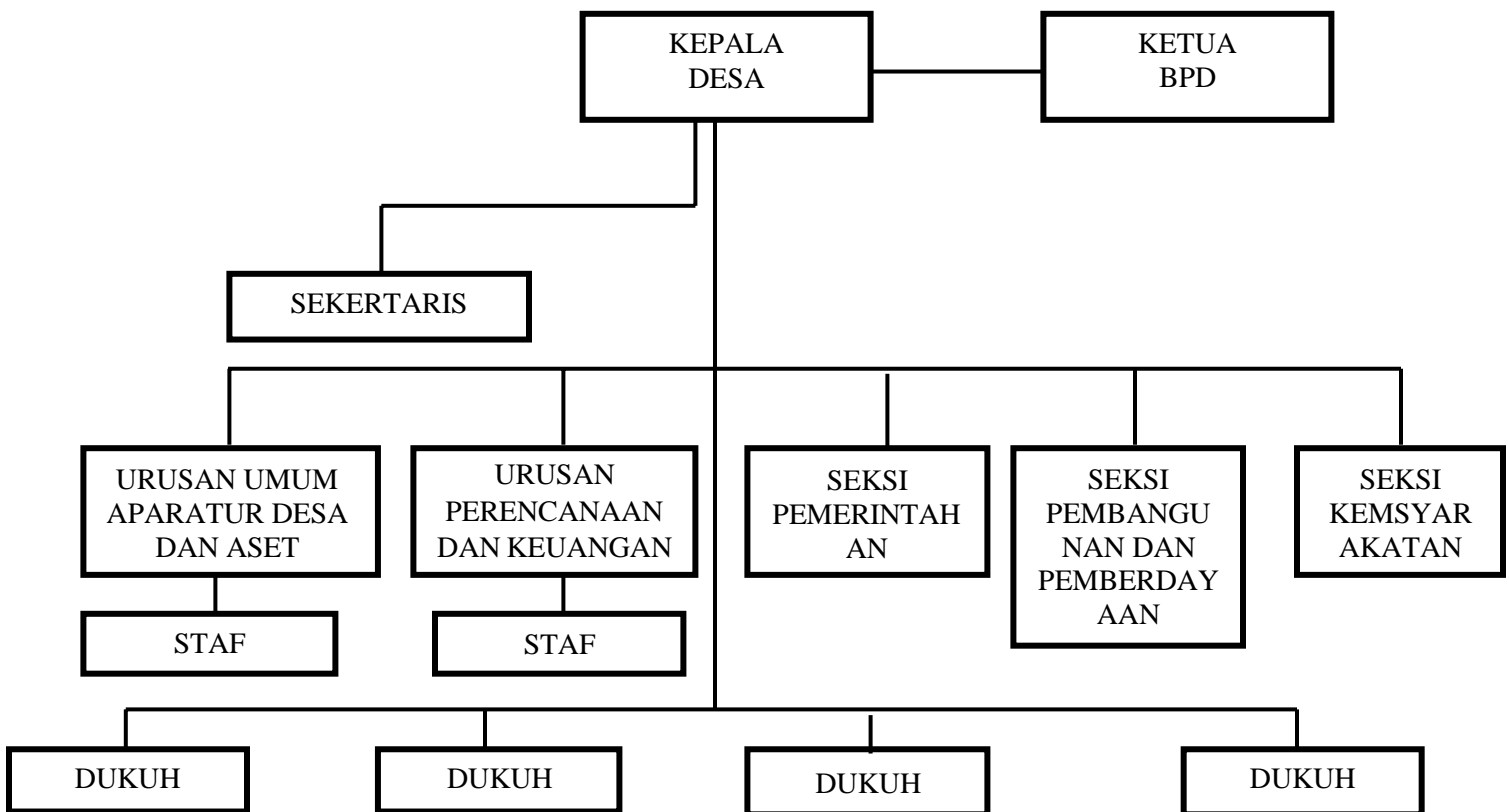
*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Dari data tabel 2.22 menunjukkan Desa Sambirejo cukup memperhatikan kebersihan lingkungan mereka terlihat dari jumlah unit sampah lingkungan atau RT sebanyak 9.999 unit. Sambirejo memiliki 2 pemulung yang tentunya menjadikan sampah sebagai mata pencaharian bagi mereka, hal ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak yaitu antara pemulung dan Desa Sambirejo.

## J. Organisasi Pemerintah Desa

Organisasi pemerintah desa merupakan sebagai satu kesatuan organisasi yang memiliki legalitas untuk mengelola jalan roda pemerintahan di dalam sebuah desa. Pemerintah desa selayaknya eksekutif yang menjalankan fungsi-fungs eksekutif dan kemudian dibantu oleh BPD sebagai legislatif untuk sekala desa. Dalam Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja (SOT) Pemerintah Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Dalam pasal 2 dijabarkan juga bahwa Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

**Bagan 1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sambirejo**



*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

## **1. Tugas dan Pelaksanaan Teknis Pemerintahan**

Kepala desa tidak bekerja sendirian dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Kepala desa dibantu oleh unsur pelaksana teknis dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa, unsur kepala teknis yang menjalankan pemerintahan desaberada di dalam sekretariat desa yang dipimpin oleh sekretaris desa. Unsur pelaksana teknis terbagi ke dalam beberapa kepala seksi yang masing-masing setiap bagian memiliki fungsi berdasarkan pada pembagian tupoksi kerja. Di dalam sebuah pemerintahan desa terdiri paling banyak tiga unsur pelaksana teknis, yaitu seksi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta paling sedikit dalam sebuah pemerintahan desa terdiri atas dua seksi yaitu pemerintahan dan kesejahteraan dan pelayanan. Selain seksi pemerintah desa juga memiliki kepala urusan yang terbagi menjadi dua bagian yaitu urusan umum aparatur desa dan aset dan urusan perencanaan dan keuangan. Sekretaris desa sebagai pelaksana kegiatan teknis yang membantu kegiatan harian dari kepala desa. Adapun berikut data Pemerintah Desa Sambirejo dalam bentuk tabel:

**Tabel 2. 22****Data kenggotaan Pemerintah Desa Sambirejo**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Padukuhan</b>
1	Waluyo S.IP	Kades Pejabat Sementara	S1	-
2	Mujimin S.Sos	Sekretaris	S1	Gedang
3	Tukiman	Kepala Seksi Pemerintahan	SLTA	Gunungsari
4	Ngatijo	Kepala Seksi Kesejahteraan	SLTP	Gunungsari
5	Supandi	Kepala Seksi pelayanan	SLTA	Kikis
6	Muryanto	Kepala Urusan Keuangan	SLTA	Nglengkong
7	Tarini	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	SLTA	Nglengkong
8	Rantini	Kepala Urusan Perencanaan	SLTA	Gedang
9	Badul Azis	Staf	S1	Nglengkong
10	Sri Yanto	Staf	SLTA	Nglengkong
11	Sehono	Staf	SD	Gunungsari
12	Teguh Widodo	Dukuh	SLTA	Sumberwatu
13	Jumiran	Dukuh	SLTP	Dawangsari
14	Bagiyo	Dukuh	SLTA	Kikis
15	Suharto	Dukuh	SLTP	Gedang
16	Jaini	Dukuh	SLTP	Mlakan
17	Pardiyono	Dukuh	SLTP	Gunungcilik
18	Maryono	Dukuh	SLTA	Gunungsari
19	Ahmadi	Dukuh	SLTA	Nglengkong

*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

Dari tabel 2.23 diketahui nama, tugas, pendidikan dan dusun dari setiap pegawai yang ada di dalam Pemerintahan Desa Sambirejo. Adapun berikut rincian tugas dan fungsi dari setiap pegawai desa:



a. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan desa. Kepala desa sebagai kepala eksekutif yang menentukan, merancang dan membuat kebijakan bersama dengan BPD. Selain sebagai pembuat kebijakan kepala desa juga memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

- Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Tugas dan Fungsi Sekertaris Desa

Bagian Sekertariat desa dipimpin oleh seorang sekertaris yang melaksanakan tugas harian dari kepala desa. Sekertaris membawahi tiga unsur staf yang bekerja dibawah kewenangan seorang sekertaris desa. Dalam sekertariat desa terbagi menjadi tiga bagian yaitu, urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit dua urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Adapun sebagai berikut rincian tugas dari setiap unsur kerja dalam sekertariat:

- **Sekertaris Desa (Sekdes)**, berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, sekretaris desa mempunyai fungsi:
  - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
  - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;

- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan;

- **Tugas dan Fungsi Kepala Urusan**

Kepala urusan termasuk di dalam sekretariat desa yang bekerja dibawah sekretari desa. Sekretariat bertugas sebagai pendukung terhadap urusan administrasi yang dikerjakan oleh sekretari desa. Berikut fungsi-fungsi kepala urusan:

- 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi

administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;

- **Tugas dan Fungsi Kepala Seksi**

Kepala seksi termasuk juga dalam sekretariat desa yang bekerja sebagai pelaksana kerja operasional yang membantu jalannya pemerintahan desa dan dibawah kewenangan sekretaris desa. Adapun sebagai berikut fungsi dari unsur seksi:

1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;

2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasimasyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;

- 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;

## **2. Tugas dan Fungsi Pelaksana Kewilayahan**

Pelaksana tugas kewilayahan dipimpin oleh seorang dusun, bekerja membantu pemerintah desa untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan pada wilayah yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah desa. Tugas pelaksanaan kewilayahan menyesuaikan dengan kondisi geografis, kepadatan penduduk, dan keuangan desa dalam mengelola wilayah yang termasuk ke dalam pemerintahan desa.

### **K. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa, sebagai penyelenggara jalannya pemerintahan, BPD menjadi mitra kerja dari Pemerintah desa. BPD sebagai perwakilan dari setiap wilayah yang ada di dalam desa yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat atau bisa juga melalui pemilihan oleh masyarakat secara langsung sebagai perwakilan wilayah di dalam desa. Data anggota BPD Sambirejo dapat dilihat melalui Tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 23****Data BPD Sambirejo**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Dusun</b>
1	Dwi Santosa	Ketua	SLTA	Gunungsari
2	Dony Oca Prasetya	Wakil Ketua	SLTA	Nglengkong
3	Ubandel Santosa	Sekretaris	SLTA	Mlakan
4	Samidi	Pokja Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat	SLTP	Gedang
5	Nuning Partini	Pokja Prmbangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	SLTA	Kikis
6	Sakijo	Anggota	SLTA	Dawang Sari
7	Purnomo	Anggota	SLTA	Gedang

*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

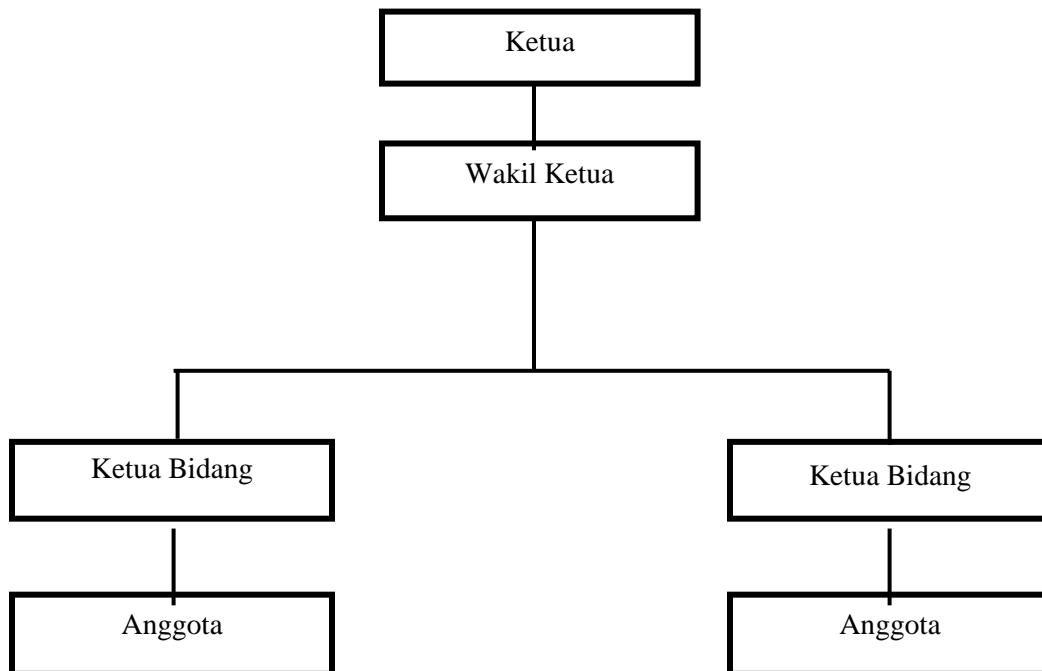
Dari tabel 2.24 diketahui bahwa BPD Desa Sambirejo dari keanggotaan secara keseluruhan yaitu sebanyak tujuh orang anggota BPD. Data menunjukkan bahwa mayoritas dari anggota BPD menyandang pendidikan setingkat SLTA. Hanya ada satu anggota dari BPD yang berstatus pendidikan setingkat SLPT, hal ini sejalan dengan UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 54 menyebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi BPD paling rendah pendidikan setingkat SLTP. Desa Sambirejo sudah menjalankan peraturan dan mampu memenuhi persyaratan tersebut.

Dalam Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Tugas Badan Permusyaratan Desa (BPD), mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

dan melakukan pengawasan kinerja Kepala desa. Fungsi pengawasan BPD di Desa Sambirejo juga sampai pada pengawasan terhadap pengelolaan unit usaha BUM Desa Tebing Breksi. BPD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembagian hasil atau pengembalian hasil Tebing Breksi kepada masyarakat dalam bentuk sesuai dengan kesepakatan Pemerintah desa dan BPD.

Berikut susunan organisasi dari BPD di Desa Sambirejo. Susunan organisasi ini akan menggambarkan struktur kerja dan pembagian kerja BPD Sambirejo:

**Bagan 2**  
**Struktur Organisasi BPD Sambirejo**



*Sumber: Arsip Desa Sambirejo 2019*

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, H. Raharjo, *pembangunan perdesan pendekatan partisipatif, Tipologi, strategi konsep desa pusat pertumbuhan*, cet. ke-1 graha ilmu: Yogyakarta 2013.
- Asnudin, A. (2009). pembangunan infrastruktur perdesaan dengan perlibata masyarakat setempat. *jurnal SMARTek*, 292.
- Adisasmita, R., *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Graha Ilmu. Yogyakarta*, 2006.
- Adisasmita, H. Rahardjo, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, Cet. Ke-1 Graha Ilmu: Yogyakarta, 2013.
- Departemen Pekerjaan umum. 2008. *Pedoman Teknis Program Pembangunan Ifrastruktur Pedesaan*
- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Kodoatie, R. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Leonard D. White dalam Siagian, Sondang P. 2008. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdkarya.
- Malayu S.P Hasibuan, 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi. Bandung. Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: PT Alfabeta.\
- Yonatan, dkk (2014). Implementasi pembangunan infrastruktur dalam menun jangka kelancaran pelayanan pada masyarakat di kecamatan mentarang kabupaten malinau. *Jurnal admistrative reform*, 541.

### Peraturan Undang-Undang

- Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa..  
Permendagri no.38 2007 tentang kerja sama desa; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Desa  
Undang-undang desa No 6 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa

### Sumber Internet

- <https://puspar.ugm.ac.id/2019/02/11/pengembangan-fasilitas-dan-infrastruktur-untuk-mendukung-pengembangan-pariwisata-sebagai-sumber-ekonomi-utama-di-desa-sambirejo-prambanan/>
- <http://repo.apmd.ac.id/1181/1/HILDA%20REKADEVI%2016520007.pdf>
- [http://digilib.uin-suka.ac.id/30783/1/13230014\\_BAB-I\\_IV\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/30783/1/13230014_BAB-I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)
- <https://hot.liputan6.com/read/4663610/pengertian-kebudayaan-secara-umum-unsur-dan-wujudnya-menurut-para-ahli>
- <https://ejournal.uksw.edu/kritis/article/download/4403/1628>